

Ektor UMKM di Indonesia: “Profil, Masalah, Peran Penting, dan Strategi Pengembangan UMKM ‘

Dwi Angraini, Zhafirah Salsabila

dwiagr00@gmail.com, zsalsabila12@gmail.com

Abstract: Indonesia has great potential to become a country with a large-scale economy in the world thanks to its natural resources, human resources, macroeconomic stability and conducive investment climate. However, serious social problems such as poverty and unemployment still exist. Efforts to overcome this social problem through empowering (UMKM) are an important step, with the development of information technology, infrastructure and entrepreneurship education. This can help increase economic growth, reduce poverty, and create competent entrepreneurs. The conclusion of this paper is that the strong commitment from the government has encouraged the development of (UMKM), which have good prospects for further empowerment. This interest is related to the less than satisfactory national economic conditions in recent years, which are partly caused by the financial and non-financial problems faced by (UMKM). Community welfare is very important in an economic context, and (UMKM) play a role in meeting people's daily needs, such as clothing and food. This research aims to understand the role of (UMKM) in improving community welfare, which in turn can support the country's economic growth and development. Apart from that, legal aspects also support efforts to realize community welfare through regulations aimed at supporting (UMKM).

Keywords: UMKM, important role, development strategy

Abstrak: Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara dengan ekonomi skala besar di dunia berkat sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas makroekonomi, dan iklim investasi yang kondusif. Namun, permasalahan sosial serius seperti kemiskinan dan pengangguran masih ada. Upaya untuk mengatasi masalah sosial ini melalui pemberdayaan UMKM merupakan langkah penting, dengan pengembangan teknologi informasi, infrastruktur, dan pendidikan kewirausahaan. Ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan wirausahawan yang kompeten. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa komitmen yang kuat dari pemerintah telah mendorong perkembangan UMKM, yang memiliki prospek baik untuk diberdayakan lebih lanjut. Kepentingan ini terkait dengan kondisi ekonomi nasional yang kurang meyakinkan dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian disebabkan oleh permasalahan finansial dan nonfinansial yang dihadapi UMKM. Kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam konteks ekonomi, dan UMKM berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti sandang dan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Selain itu, aspek hukum juga mendukung usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui regulasi yang ditujukan untuk mendukung UMKM.

Kata kunci: UMKM, peran, strategi pengembangan

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam kurun waktu terakhir. UMKM menjadi bidang usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain memiliki andil dalam penyediaan lapangan kerja, UMKM juga menjadi mata rantai penyebaran distribusi hasil pembangunan. Jika dilihat dari sisi serapan tenaga kerja, pada 2013 UMKM menyerap sebanyak 114.144.082 tenaga kerja atau sekitar 96.99% tenaga kerja di Indonesia, sedangkan sisanya 3% diserap korporasi. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yang menyerap 107.657.509 tenaga kerja.

Dengan berdirinya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mempermudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Badrudin kesejahteraan masyarakat ialah keadaan yang memperlihatkan mengenai kondisi kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar hidup masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2005) ada delapan indikator yang dapat digunakan guna melihat tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu pemasukan, makanan, kondisi rumah, fasilitas rumah, kesehatan, fasilitas memperoleh layanan kesehatan, fasilitas

anak di jenjang pendidikan, dan keringanan memperoleh fasilitas transportasi. (Aliyah, 2022)

Dari delapan indikator tersebut, UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimulai dari pendapatan, dengan adanya UMKM pastinya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga pendapatan masyarakat juga semakin tinggi. Selain itu, pendapatan yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat seperti halnya meningkatnya daya beli masyarakat (Prasetyo, 2008). Selanjutnya, apabila daya beli masyarakat sudah semakin meningkat dapat membantu mewujudkan fasilitas-fasilitas yang mumpuni bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya UMKM akan menjadikan indikator-indikator tersebut saling berkesinambungan, sehingga kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah tercapai. (Aliyah, 2022)

Upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah di satu pihak serta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat pembentukan peraturan perundang-

undangan yang berpihak pada UMKM.
(Hanim & Noorman, 2018)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka yang didukung oleh data-data sekunder. Hasil dari penelitian ini ditinjau dari aspek ekonomi menyatakan bahwa keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan semakin baik pertumbuhan serta pembangunan ekonomi negara.

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara didefinisikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut ditentukan oleh adanya kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta

tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ekonomi klasik terutama mencurahkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. (Halim, 2020)

Kualitas tenaga kerja akan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain pendidikan dan kesehatan. Di antara berbagai aspek ini, pendidikan dianggap yang memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Implikasinya, dengan semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan makin tinggi produktivitasnya dan dengan demikian juga akan makin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Nugroho, 2014)

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya

memiliki tingkat penghasilan yang rendah, tidak terkelola dengan baik, bahkan dalam beberapa kasus, kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, Pendidikan, Kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Usaha-usaha mikro kecil umumnya juga merupakan bagian dari kegiatan keluarga, tidak berbadan hukum, mempergunakan teknologi sederhana, memanfaatkan sumber daya local dan tidak secara resmi diakui sebagai sector ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian nasional sehingga sering disebut dengan *sector informal, underground economy atau extra legal sector*. (Isnaini, 2023)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300.000.000.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau buka cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak aset Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan dari Rp 300.000.000 hingga maksimum Rp 2.500.000.000.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000.000

milyar sampai paling tinggi Rp 50.000.000.000.

Peran Penting UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian, khususnya pada negara-negara berkembang. UMKM yang memiliki badan hukum formal dapat berkontribusi hingga 60 persen dalam membuka lapangan pekerjaan dan 40 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini akan jauh lebih besar jika UMKM dalam bentuk informal juga dihitung. Bank dunia memperkirakan bahwa akan terbentuk 600 juta pekerjaan dalam 15 tahun mendatang di sektor ini, terutama di Asia dan Afrika Sub-Sahara.

Dalam kasus Indonesia, UMKM meruoakan basis usaha masyarakat yang mampu bertahan dari krisis ekonomi tahun 1997, 2007, dan 2011 padahal usaha-usaha besar banyak yang bangkrut karena tidak mampu mengembalikan hutang-hutang yang sudah jatuh tempo karena sumber bahan baku berbasis mata uang asing yang sangat fluktuatif terhadap nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi UMKM yang menggunakan bahan

baku local sehingga struktur keuangannya tidak banyak bergantung pada perbankan dan mengandalkan modal secara mandiri. (Isnaini, 2023)

Di Indonesia sendiri, UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2013 UMKM menyumbangkan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Jumlah pelaku usaha pada periode tersebut mencapai sebesar 57.895.721 pelaku usaha atau 99,99 persen dari seluruh jumlah pelaku usaha. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 114.144.082 orang atau 96,99 persen tenaga kerja yang tersedia telah terserap ke sektor tersebut. Termasuk berkontribusi sebesar 63,42 terhadap pembentukan PDB (Atas Dasar Harga Berlaku 2000) dan total ekspor nonmigas sebesar 15,68 persen. (Permana, 2017)

Pengembangan Sektor UMKM

Keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan dimana melalui pemberdayaan UMKM yang telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang

pernah dialami bangsa Indonesia. Meskipun kita sadari bersama bahwa UMKM kurang mendapatkan perhatian di Indonesia sebelum krisis pecah pada tahun 1997. Namun demikian, sejak krisis ekonomi melanda Indonesia (yang telah meruntuhkan banyak usaha besar) sebagian besar UKM tetap bertahan, bahkan jumlahnya meningkat dengan pesat, perhatian pada UMKM menjadi lebih besar, kuatnya UMKM juga didukung oleh struktur permodalannya yang lebih banyak tergantung pada modal sendiri (73%), 4% bank swasta, 11% bank pemerintah, dan 3% pemasok.

Perkembangan UMKM dapat dikatakan cukup baik dan masih memiliki prospek yang baik untuk ditingkatkan, mengingat proses restrukturisasi sektor korporat dan BUMN berlangsung lambat, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UMKM dalam berbagai sektor ekonomi. Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan

semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik. (Yanto Niode, 2009)

Permasalahan UMKM

Menurut paradigma liberal, permasalahan UMKM dibedakan menjadi 3 yaitu :

1. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UKM, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.
2. Permasalahan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten.
3. Permasalahan antara, yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan, keterbatasan

dalam kewirausahaan. (Setyobudi, 2007)

Permasalahan yang dihadapi UMKM yaitu permasalahan internal meliputi

1. Rendahnya profesionalisme tenaga pengelola UMKM
2. Keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar
3. Kemampuan penguasaan teknologi yang masih kurang.

Sedangkan permasalahan eksternal yang meliputi :

1. Iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan usaha kecil
2. Kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya
3. Kurangnya dukungan
4. Kurangnya pembinaan, bimbingan manajemen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. (Yustika, 2005)

Strategi Pengembangan Sektor UMKM

Pengembangan UMKM memerlukan :

1. Strategi penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif.
Iklim investasi yang baik akan mendorong investor atau pengusaha mau menginvestasikan

dananya bagi pengembangan UMKM. Demikian pula dengan iklim usaha yang baik akan mendorong pengusaha untuk lebih termotivasi dalam berinovasi terhadap produk yang dihasilkan sehingga dapat menambah daya saing di pasar bagi produk yang dihasilkan. Strategi dalam mengembangkan iklim investasi dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak, standar upah yang relatif rendah maupun insentif lainnya. Sedangkan strategi pengembangan iklim usaha yang baik dengan menciptakan regulasi yang mendukung bagi ekspansi UMKM.

2. Strategi penguatan kemampuan wirausahawan.
Penguatan kemampuan wirausahawan dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, salah satunya memberikan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang berkaitan dengan manajemen, pemasaran, maupun dalam hal inovasi produk.
3. Strategi penguatan sector keuangan untuk pembiayaan.
Strategi penguatan sektor keuangan untuk pembiayaan UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk memperbanyak lembaga keuangan

mikro (LKM) agar dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM secara intensif. Lembaga keuangan mikro dapat memberikan pembiayaan bagi pengembangan dan peningkatan peran UMKM.

4. Strategi Kemudahan dalam Pemberian Perizinan, Badan Hukum, dan Hak Paten (Haki/Hak Atas Kekayaan Intelektual).
5. Strategi pemberian fasilitas pemasaran, Pemberian fasilitas pemasaran dalam bentuk kemudahan fasilitas pemasaran seperti pengangkutan, promosi, dan sarana informasi akan memberikan dampak yang besar bagi penyerapan produk.
6. Strategi penyediaan bahan baku. Strategi ini harus disediakan dengan cara mempermudah untuk memperoleh bahan baku sekaligus menyediakan bahan baku yang murah, baik bahan baku yang berasal dari dalam negeri maupun bahan baku yang didatangkan dari luar negeri. Dengan ketersediaan bahan baku yang murah akan mendorong produktivitas menjadi lebih tinggi, sehingga dalam jangka panjang UMKM mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. (Amri, n.d.)

7. Strategi pengembangan infrastruktur.

Kebijakan pengembangan infrastruktur dapat berbentuk perbaikan berkala sarana dan prasarana transportasi (jalan, pelabuhan, bandara). Kebijakan ini akan memperlancar pendistribusian hasil produksi

KESIMPULAN

UMKM memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam struktur perekonomian nasional. Jika UMKM dapat berkembang dengan baik maka, UMKM akan menyerap tenaga kerja yang besar sehingga akan mengurangi pengangguran. Tetapi jika UMKM tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sector ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun.

Dalam pengembangannya, UMKM tidak selamanya berjalan mulus namun tetap ada permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan tersebut antara lain, kurangnya sdm yang berkualitas, kurangnya modal, kurangnya bimbingan dan pembinaan dari pihak yang terkait, kemampuan teknologi yang rendah, infrastruktur yang tidak memadai dan lain sebagainya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat, komprehensif dan berkelanjutan. Strategi tersebut dapat berbentuk : strategi penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif, strategi penguatan kemampuan wirausahawan, strategi penguatan sektor keuangan untuk pembiayaan, strategi kemudahan dalam pemberian perizinan, badan hukum, dan hak paten (HAKI/hak atas kekayaan intelektual), strategi pemberian fasilitas pemasaran, strategi dalam penyediaan bahan baku, strategi pemberian pendampingan dan bimbingan, dan strategi pengembangan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72.
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>
- Amri, F. (n.d.). Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan. *Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*, 378–389.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. 1(2).
<https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>
- Hanim, L., & Noorman, M. (2018). Umkm (Usaha Mikro, Kecil & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha (D. R. Hartono, Ed.). UNISSULA PRESS.
- Isnaini. (2023). Ekonomi Pembangunan (*Pendekatan Transdisipliner*). PERDANA PUBLISHING.
- Nugroho. (2014). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 29(2), 195–202.
- Permana, S. H. (2017). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia. *Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia*. 8(1), 93–103.
<http://news.detik.com/>
- Prasetyo, P. E. (2008). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *AKMENIKA UPY*, 2(1).
- Setyobudi, A. (2007). Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 29–35.
- Yanto Niode, I. (2009). Jurnal-Sektor-Ukm-Di-Indonesia-Profil-Masalah-Dan-Strategi-Pemberdayaan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis OIKOS-NOMOS*, 2(1).
- Yustika, A. E. (2005). Perekonomian Indonesia Deskripsi, Preskripsi, Dan Kebijakan. Malang : Bayumedia.